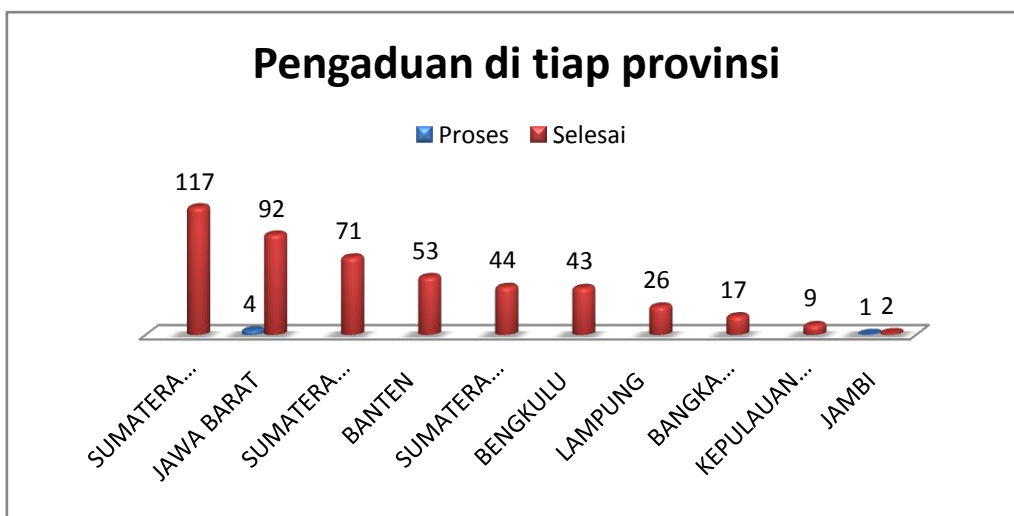


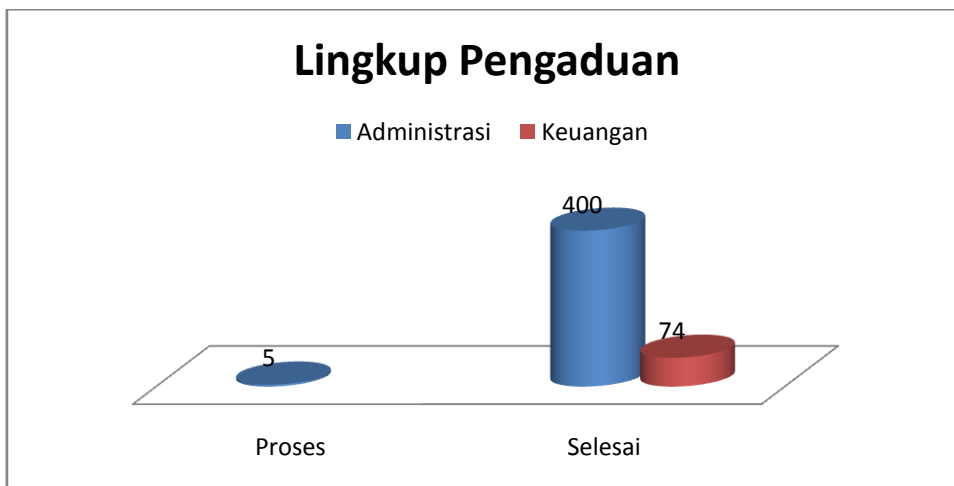
A. Perkembangan PPM bulan Oktober 2016

Pengaduan yang telah masuk pada bulan Oktober 2016 sebanyak 479 pengaduan. Pengaduan yang telah selesai ditangani 474 pengaduan (99%) dengan status proses sebanyak 5 pengaduan. Pengaduan tersebut dikirim dari 10 provinsi dan 3 provinsi tidak mengirimkan data aduan. Provinsi yang tidak mengirimkan data Provinsi Riau, Kalimantan barat dan DKI Jakarta.

Grafik 2.1. Capaian Pengaduan tiap Provinsi

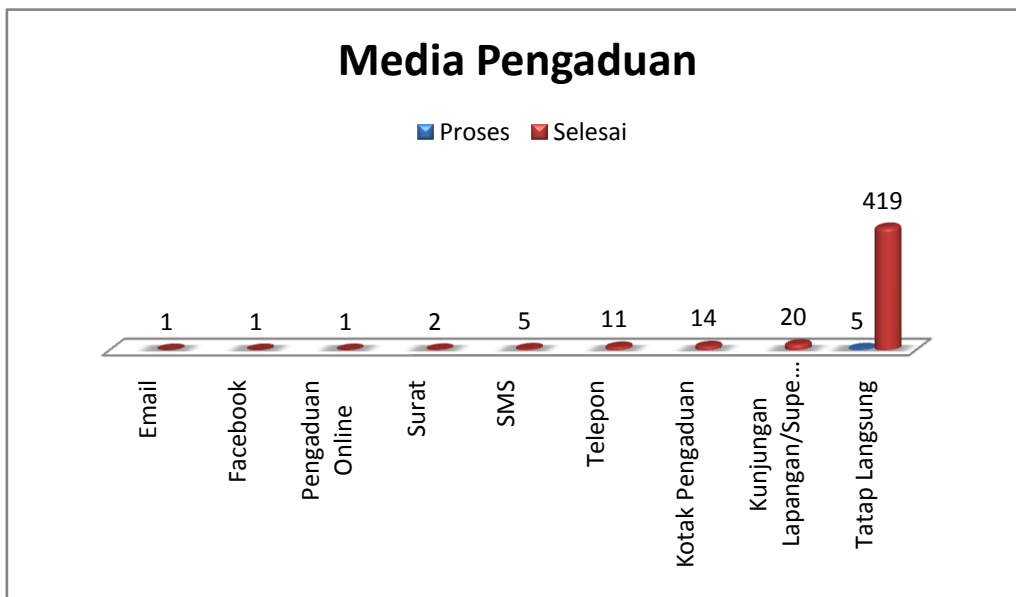


Provinsi dengan pengaduan tertinggi pada bulan Oktober 2016 terdapat di Provinsi Sumatera utara (24%). Sedangkan provinsi dengan pengaduan terendah terdapat di Provinsi Jambi sebanyak 3 pengaduan (1%), dengan pengaduan status proses 1 pengaduan. Pengaduan yang berstatus proses terdapat di Provinsi Jawa barat dan Jambi. Pengaduan status proses tersebut berada pada lingkup administrasi, dengan derajat pengaduan pada tingkat kelurahan.



1) Pengaduan berdasarkan Media

Grafik 1. Pengaduan berdasarkan Media

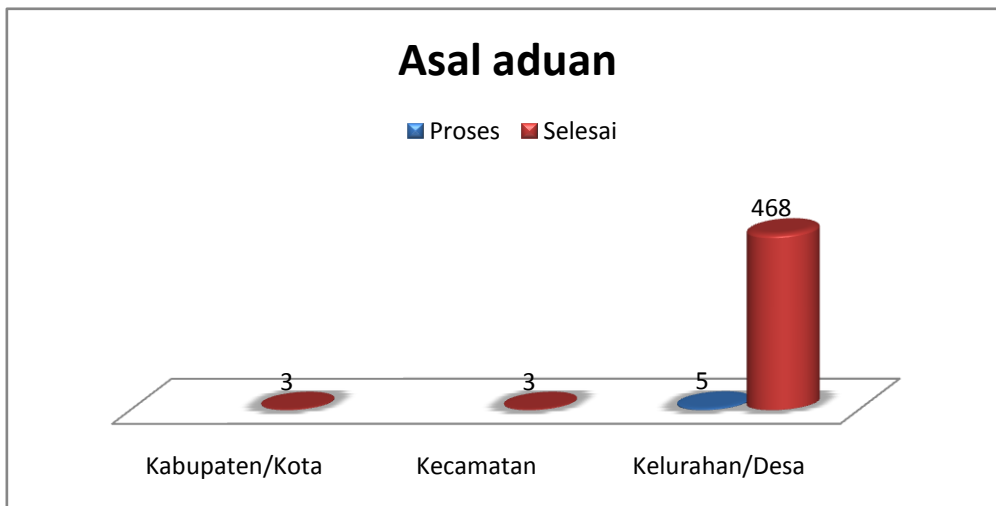


Berdasarkan media pengaduan yang paling dominan di bulan Oktober 2016 ada pada media tatap langsung. Media terendah pada bulan ini terdapat pada media Pengaduan online dan email. Pada media tatap langsung terdapat pengaduan dengan status proses sebanyak 5 pengaduan berasal pada tingkat kelurahan. Pengaduan tersebut ditangani pada derajat kelurahan.

2) Pengaduan berdasarkan derajat aduan

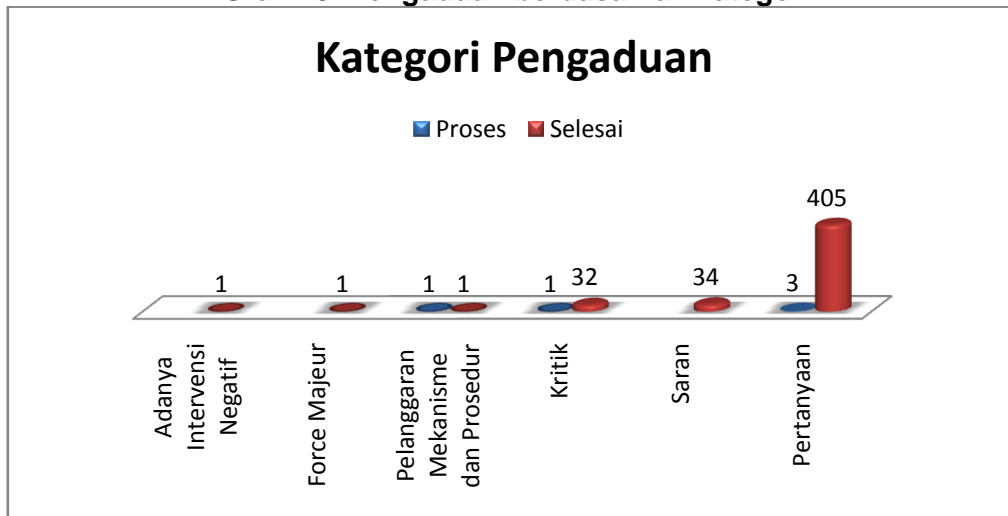
Berdasarkan asal aduan yang lebih dominan terdapat pada tingkat kelurahan 473(98,7%). Pengaduan tersebut masih berstatus proses 5 kasus. Pada tingkat kelurahan asal aduan lebih dominan dengan media tatap langsung karena berupa pengaduan informatif (pertanyaan, saran dan kritik).

Grafik 2. Pengaduan berdasarkan derajat aduan



3) Pengaduan berdasarkan kategori

Grafik 3. Pengaduan berdasarkan kategori

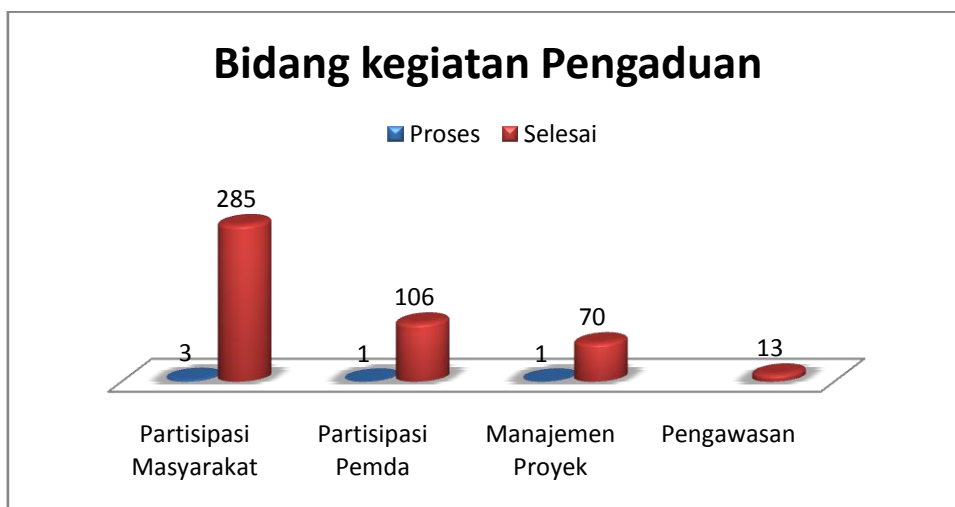


Pengaduan berdasarkan kategori yang tertinggi pada kategori pertanyaan 408 (85,2%). Pengaduan yang terendah pada kategori intervensi negatif dan force Majeur. Pengaduan tersebut berasal dari Provinsi Jawa barat. Pengaduan yang berstatus proses dari kategori pelanggaran mekanisme dan prosedur 1 kasus dari Provinsi Jambi. Kasus 4 kasus dari Provinsi Jawa barat dengan kategori 1 Kritik dan 3 kasus pertanyaan.

4) Pengaduan berdasarkan Bidang Pelaksanaan

Berdasarkan bidang kegiatan partisipasi masyarakat lebih dominan mencapai 288 aduan (60,1%). Partisipasi Pemda mencapai 107 aduan (22,3%). Partisipasi masyarakat didominasi dengan pertanyaan 246 pengaduan (85%). Sedangkan Partisipasi pemda didominasi pertanyaan 97 pengaduan (91%).

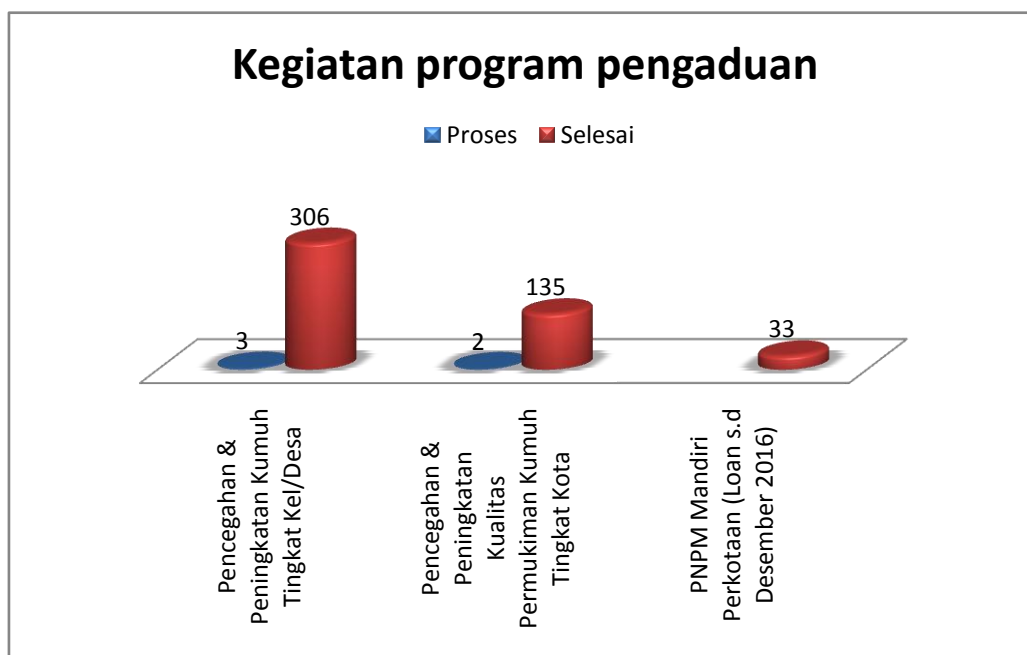
Grafik 4. Pengaduan berdasarkan bidang kegiatan



5) Pengaduan berdasarkan Program kegiatan

Bila dikaitkan Program kegiatan maka program kegiatan yang dominan sering ditanyakan oleh masyarakat berkaitan dengan program kumuh skala kelurahan sebanyak 309 pengaduan (64,5%) dan program kumuh skala kota/ kabupaten sebanyak 137 (28,6%). Kegiatan pada skala kota berkaitan dengan kolaborasi/ kemitraan tingkat kota, pelaksanaan sosialisasi tingkat kelurahan, verifikasi data kumuh dan SK Kumuh, seleksi dan penetapan kel/desa.

Grafik 5. Pengaduan berdasarkan program



6) Penyimpangan dana

Penyimpangan dana di bulan Juni 2016 masih terdapat kasus penyimpangan dana di Kabupaten Bengkulu selatan pada program pencegahan dan peningkatan kawasan kumuh tingkat kelurahan yang masih status proses. Nilai dana yang disimpangkan sebesar 1,75juta. Pelakunya merupakan mantan faskel. Kasus ini masih dalam tahap penyelesaian dan ini merupakan temuan dari BPKP pada pembukuan UPK.